

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hambatan terbesar untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah pembangunan ekonomi negara yang tidak merata. Lebih lanjut, kemiskinan bersifat kausal (*circular debt*), yang berarti bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi disebabkan oleh pendapatan per kapita yang rendah sebagai akibat dari sedikitnya investasi. Tujuan pembangunan khususnya dalam konteks pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama yang dimiliki oleh semua pengembang adalah mewujudkan kepentingan bersama. Rencana pembangunan yang baik yang mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan juga diperlukan agar upaya pembangunan menjadi efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan. Organisasi tipe A Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu organisasi yang terlibat dalam pembentukan Kabupaten Purbalingga.[1]

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan Perancangan *Prototipe* Sistem Informasi Input Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga sebagai bagian dari proses Praktek Kerja Lapang (PKL). Input data kemiskinan bagi warga Kabupaten Purbalingga dimungkinkan dengan rancangan *prototipe* ini, dan pengguna dapat mengakses kegiatan, berita, dan informasi geografis dari BAPPELTBANGDA Purbalingga melalui tampilan web.



Gambar 1 BAPPELTBANGDA

### 1.2 Tujuan

1. Desain *prototype* sebagai gambaran agar saat penginputan data dilakukan dengan efisien.
2. Menambah wawasan untuk mahasiswa dalam merancang website menggunakan *prototype*.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Penulis di tempatkan pada ruang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial. Tugas yang dikerjakan pada divisi tersebut yaitu melakukan penginputan data masyarakat purbalingga yang tergolong dalam masyarakat miskin dan mendata surat yang masuk.

### **1.4 Aspek Umum dan Kelembagaan**

#### **1.4.1 Sejarah**

Berdasarkan Peraturan Dewan Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuklah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan peraturan pemerintah yang muncul setelah peraturan ini, dan berfungsi untuk mendukung urusan pemerintahan Bupati di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan kewenangan daerah.

BAPPELITBANGDA Salah satu organisasi yang memanfaatkan teknologi adalah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Jl. Jambu Karang, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah bertugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan tugas penunjang teknis, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penunjang teknis, serta melaporkan, memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan penunjang pemerintah daerah, dan melaksanakan dinas tugas. kesekretariatan, melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, termasuk merencanakan dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan usaha pembangunan.

#### **1.4.2 Visi dan Misi**

BAPPELITBANG Daerha Purbalingga memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

##### **VISI**

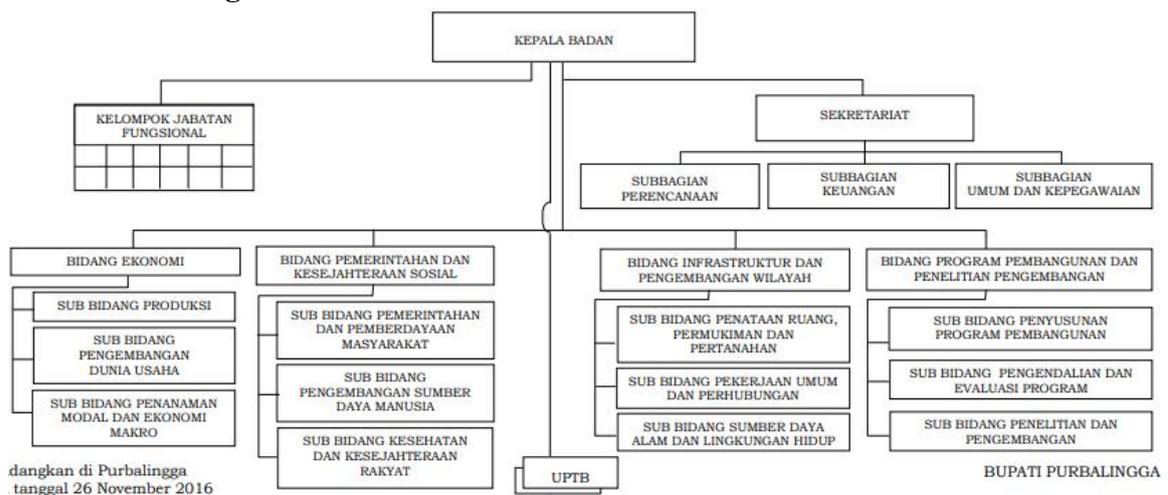
1. Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia

##### **MISI**

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

### 1.5 Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Purbalingga

Struktur organisasi BAPPELITBANNGDA Purbalingga diatas pada saat PKL saya di tempatkan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang merupakan divisi yang salah satu tugasnya untuk melakukan penginputan data kemiskinan di kabupaten Purbalingga.

### 1.6 Metode Penulisan Laporan

Metode yang di lakukan untuk mendapatkan hasil serta tujuan yang diharapkan yaitu :

1. Observasi

Dengan mengikuti PKL di BAPPELITBANGDA Purbalingga dalam Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial penulis dapat melakukan observasi yang lebih jauh mengenai permasalahan dan kekurangan yang akan di angkat dan di ukur untuk dapat atau cocok di lakukan sebagai objek analisa.

## 2. Studi Literatur

Setelah melakukan observasi penulis dapat melanjutkan mencari beberapa referensi sesuai judul yang diangkat untuk memperkuat data.[2]

### 1.7 Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman laporan kegiatan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, aspek dan kelembagaan, metode penulisan laporan dan sistema penulisan.

#### **BAB II DASAR TEORI**

Berisi definisi berdasarkan kutipan surat kabar serta terkait dengan gagasan laporan.

#### **BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Meliputi pembahasan dan analisis pada penginputan data masyarakat di kabupaten purbalingga.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang di peroleh setelah penyusunan laporan kegiatan PKL.